

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN**

LAPORAN KEUANGAN

**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2020**

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT IZIN CETAK LAPORAN KEUANGAN	1
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	2
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	3
LAPORAN KEUANGAN	
Neraca Per 31 Desember 2021 dan 2020	4
Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir 31 desember 2021 dan 2020	5
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	6
Laporan Arus Kas Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	7
Laporan Realisasi Anggaran Lebih Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021..	8
Laporan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
Gambaran Umum	10
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	14
Penjelasan Pos-Pos Neraca dan Laporan Operasional	28
LAMPIRAN	

UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN

SURAT IZIN CETAK LAPORAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
Jl. HOS Cokroaminoto No. 347 Telp. (0285) 420962 Kota Pekalongan
E-mail : puskpeklselatan347@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG
IZIN CETAK ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: dr. Aswina 'Azis Michroza
Alamat kantor	: Jl. Hos Cokroaminoto No. 347
Alamat rumah sesuai KTP	: Jl. Sutan Syahrir Gg.4 No.295 Rt.001 Rw.003 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat
Jabatan	: Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa :

Pihak Manajemen mengijinkan untuk UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN untuk periode/tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 4 (empat) eksemplar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Maret 2022

Kepala Puskesmas



***UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
Jl. HOS Cokroaminoto No. 347 Telp. (0285) 420962 Kota Pekalongan
E-mail : puskpeklselatan347@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: dr. Aswina 'Azis Michroza
Alamat kantor	: Jl. Hos Cokroaminoto No. 347
Alamat rumah sesuai KTP	: Jl. Sutan_syahrir Gg.4 No.295 Rt.001 Rw.003 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat
Jabatan	: Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
2. Laporan keuangan UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Maret 2022

Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan



***UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

"TARMIZI ACHMAD"

NOMOR IZIN USAHA KAP: KEP. 09 I/KM. 6/2004

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00115/2.0604/AU.5/11/0430-2/1/III/2022

Kepada Yth :

**Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - UPT Puskesmas Pekalongan Selatan
Jl. HOS Cokroaminoto No. 347
Kota Pekalongan**

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **BLUD - UPT Puskesmas Pekalongan Selatan** terlampir, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan kecurangan atau kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

“TARMIZI ACHMAD”

NOMOR IZIN USAHA KAP: KEP. 09 I/KM. 6/2004

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **BLUD - UPT Puskesmas Pekalongan Selatan** tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Semarang, 31 Maret 2022

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
“TARMIZI ACHMAD”

Prof. Dr. Tarmizi Achmad., MBA., Ak., CPA., CA., CFE., CFrA., CPI.
Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 0430



***UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

***LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021***

***UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

***CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021***

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
NERACA

Per 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2a, 3	240.533.663,00	138.335.672,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2b, 4	36.595.000,00	70.665.000,00
Penyisihan Piutang	2d, 5	(182.975,00)	(353.325,00)
Persediaan	2c, 6	159.058.181,48	149.801.505,22
Jumlah Aset Lancar		436.003.869,48	358.448.852,22
ASET TETAP	2e, 7		
Tanah		1.193.000.000,00	-
Peralatan dan Mesin		3.925.085.822,78	516.171.916,00
Gedung dan Bangunan		5.077.982.010,74	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan		733.086.767,00	-
Aset Tetap Lainnya		957.500,00	-
Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan		(4.359.029.465,78)	(439.270.640,00)
Jumlah Bersih Aset Tetap		6.571.082.634,74	76.901.276,00
TOTAL ASET		7.007.086.504,22	435.350.128,22
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Belanja	2.2,8	108.774.878,00	58.773.641,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		108.774.878,00	58.773.641,00
Jumlah Kewajiban		108.774.878,00	58.773.641,00
EKUITAS			
Ekuitas	LPE	6.898.311.626,22	376.576.487,22
Jumlah Ekuitas		6.898.311.626,22	376.576.487,22
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.007.086.504,22	435.350.128,22

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Disetujui,
Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan

dr. Aswina 'Azis Michroza
NIP. 198108242009021001

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
PENDAPATAN			
PENDAPATAN - LO	2.3		
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO			
Lain-lain PAD yang Sah - LO	9	1.711.562.920,00	1.739.226.143,00
Pendapatan Transfer - LO			
Pendapatan APBN/APBD	10	562.719.000,00	-
Pendapatan Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	11	1.874.643.067,40	-
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO			
Pendapatan Hibah LO	12	-	9.638.000,00
Jumlah Pendapatan LO		4.148.924.987,40	1.748.864.143,00
BEBAN	2.4		
Beban Pegawai	13	1.006.785.036,00	1.403.216.075,00
Beban Persediaan	14	2.168.144.420,14	804.969.665,46
Beban Jasa	15	550.923.776,00	184.673.663,00
Beban Pemeliharaan	16	67.441.861,00	50.304.413,00
Beban Perjalanan Dinas	17	256.400.000,00	-
Beban Penyusutan Aset	18	492.204.392,97	52.130.431,00
Beban Penyisihan Piutang	19	182.975,00	353.325,00
Jumlah Beban		4.542.082.461,11	2.495.647.572,46
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN		(393.157.473,71)	(746.783.429,46)

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Disetujui,
Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan

dr. Aswina 'Azis Michroza
NIP. 198108242009021001

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
EKUITAS		
Ekuitas Awal	376.576.487,22	284.183.178,00
Surplus/Defisit-LO	(393.157.473,71)	(746.783.429,46)
- Koreksi Saldo Awal Persediaan	-	61.033.160,43
- Koreksi Aset Tetap (Transfer masuk dari SKPD Dinkes)	-	4.927.120,00
- Koreksi Ekuitas - Piutang	-	(3.195.000,00)
- Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	-	379.825,00
- Koreksi Ekuitas - Dropping Persediaan	-	637.839.162,25
- Koreksi Ekuitas - Persediaan BOK	-	99.283.000,00
- Koreksi Ekuitas - Aset Tetap DINKES	6.898.013.251,71	38.572.358,00
- Koreksi Ekuitas - Ekstrakom DINKES	16.879.361,00	337.113,00
EKUITAS AKHIR	6.898.311.626,22	376.576.487,22

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.660.404.400,00	1.736.582.800,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	3.000.000,00	3.250.000,00
Pendapatan Hibah		
Pendapatan Lain-lain	81.875.195,00	1.498.343,00
Pendapatan APBN/APBD	562.719.000,00	
Jumlah Arus Masuk Kas	2.307.998.595,00	1.741.331.143,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.004.624.801,00	1.344.442.434,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.111.853.303,00	381.618.811,00
Jumlah Arus Keluar Kas	2.116.478.104,00	1.726.061.245,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	191.520.491,00	15.269.898,00
2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah		-
Perolehan Peralatan dan Mesin	89.322.500,00	39.094.226,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		-
Jumlah Arus Keluar Kas	89.322.500,00	39.094.226,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(89.322.500,00)	(39.094.226,00)
3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.163.093,00	33.595.656,00
Jumlah Arus Masuk Kas	30.163.093,00	33.595.656,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.163.093,00	33.595.656,00
Jumlah Arus Keluar Kas	30.163.093,00	33.595.656,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas	102.197.991,00	(23.824.328,00)
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	138.335.672,00	162.160.000,00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	240.533.663,00	138.335.672,00

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Pendapatan</u>		
- Pendapatan Jasa Jayanan dari Masyarakat	1.660.404.400,00	1.736.582.800,00
- Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	-	-
- Pendapatan Hasil Kerjasama	3.000.000,00	3.250.000,00
- Pendapatan Hibah	-	-
- Pendapatan Lain-lain	81.875.195,00	1.498.343,00
- Pendapatan APBN/APBD	562.719.000,00	-
Jumlah Pendapatan	2.307.998.595,00	1.741.331.143,00
<u>Belanja Operasi</u>		
- Belanja Pegawai	1.004.624.801,00	1.344.442.434,00
- Belanja Barang dan Jasa	1.111.853.303,00	381.618.811,00
Jumlah Belanja Operasi	2.116.478.104,00	1.726.061.245,00
<u>Belanja Modal</u>		
- Belanja Peralatan dan Mesin	89.322.500,00	39.094.226,00
Jumlah Belanja Modal	89.322.500,00	39.094.226,00
Jumlah Belanja	2.205.800.604,00	1.765.155.471,00
Surplus/Defisit	102.197.991,00	(23.824.328,00)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO PERUBAHAN ANGGARAN LEBIH
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KETERANGAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	138.335.672	162.160.000
2	Penggunaan SAL	-	-
3	Subtotal (1-2)	138.335.672	162.160.000
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	102.197.991	(23.824.328)
5	Subtotal (3+4)	240.533.663	138.335.672
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7	Lain-lain	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	240.533.663	138.335.672

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian

UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Kota Pekalongan merupakan Unit Dinas Kesehatan yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kesehatan di wilayah kerjanya yang meliputi Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Soko Duwet. Sejak tahun 2013 UPT Puskesmas Pekalongan Selatan menerapkan PPK BLUD Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/300 tahun 2013 tentang Penetapan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut untuk merespon kebijakan pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan akan mulai melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut akan bertumpu kepada fasilitas kesehatan primer maupun sekunder. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, terjangkau dan profesional maka Puskesmas Kota Pekalongan harus dikelola secara profesional. Prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi, optimalisasi, *benefit*, dan *cost* harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya.

UPT Puskesmas Pekalongan Selatan menerapkan pola pengelolaan BLUD secara mandiri sejak bulan Januari tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 440/1205 tahun 2019 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Pekalongan. Pola pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas Pekalongan Selatan merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b. Visi dan Misi

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Sehat Menuju Pekalongan Selatan Sejahtera”

Untuk mencapai tujuan tersebut Puskesmas mempunyai misi-misi sebagai berikut:

- a. Menggerakkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
- b. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

c. Menerapkan manajemen yang transparan dan sumber daya yang berkualitas

c. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja pegawai, dan untuk memberikan kejelasan kedudukan, tanggung jawab, wewenang serta uraian tugas, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi di UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Hal ini sesuai dengan Perubahan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Per 1 November 2021 Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya di UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Nomor 74.8 Tahun 2021, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	dr. Aswina 'Aziz Michroza	Kepala UPT Puskesmas Pkl Selatan
2	drg. Diah Retno Hapsari	Tim Mutu
3	Rizki Yuniartati Rahajeng, A.Md	Pelaksana Tata Usaha
4	Tisyana Fibrianti, S.ST.	Penanggung Jawab UKM Esensial
5	Nur Rachmawati, AMK.	Penanggung Jawab UKM Pengembangan
6	dr. Rizki Murtrinda	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium
7	Mardiyah, S.Kep Ns	Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas
8	Badrus Abas Subagyo, A.Md	Penanggung jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan

d. Dasar Hukum Penyajian Laporan Keuangan

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
- 12) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.
- 13) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019;

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

2.2. Dasar Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut :

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

a. Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b. Piutang Lain -lain PAD Sah

1. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.
 - e) Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagaipiutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- f) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- g) Pengukuran Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengakuan Piutang

- a. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang.
- b. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak daerah.
- d. Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria :
 - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- 2) Jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Telah diterbitkan surat penagihan; dan
- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

e. Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman

Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas daerah.

f. Piutang yang berasal dari Kemitraan

Berdasarkan naskah perjanjian kemitraan, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya, piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemda.

g. Piutang yang berasal dari pemberian fasilitas/jasa

Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa, pada setiap akhir periode akuntansi, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

c. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

d. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3	Piutang di ragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50 %
3.	Piutang Macet	diatas 3 tahun	100%

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

e. Aset Tetap

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- Akumulas Penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap :

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

normalentitas;

- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - 5) Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.
- b. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- c. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penyusutan Aset Tetap

- a. Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.
- b. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

2. Pengukuran Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengukuran kewajiban :

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk Utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang adasampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
- Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan.
 - b. Terjadinya pengeluaran kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.
 - d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal.

- 1) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
 - c. Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sama atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - e. Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 2) Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - Bertambah volume, dan/atau
 - Bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Belanja Hibah

- a. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- b. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- c. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- b. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- c. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- d. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

anggaran.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (*reverse*) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban adalah sebagai berikut :

- a. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- a. Beban diakui pada saat :
 - 1) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah
 - 2) Terjadinya konsumsi aset

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 4) Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
- 5) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
PENJELASAN POS - POS NERACA DAN LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CAT

3 KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 Rp.	Tahun 2020 Rp.
Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.585.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	1.585.000,00
Setara Kas		
Bank Jateng BLUD (Rekening 3-007-25226-8)	240.533.663,00	136.750.672,00
Bank Jateng Kas BOK (Rekening 3-007-25458-9)	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	240.533.663,00	138.335.672,00

Catatan:

Kas di Bank Jateng dengan No. Rekening 3-007-25226-8 dan 3-007-25458-9 (BOK) ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

4 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 Rp.	Tahun 2020 Rp.
Piutang BPJS Kesehatan	35.715.000,00	70.665.000,00
Piutang Jamkesda	880.000,00	-
Jumlah	36.595.000,00	70.665.000,00

Tahun 2021

Piutang BPJS dan Jamkesda		Status	Tanggal Verif	Tanggal Bayar	Nominal
Klaim November 2021 (Revisi)		Verifikasi	24/12/2021	10/01/2022	2.925.000,00
Klaim Desember 2021 (RJTP)		Verifikasi	21/01/2022	25/01/2022	32.790.000,00
Jamkesda		-	-	-	880.000,00
JUMLAH					36.595.000,00

Catatan:

- Piutang BPJS Kesehatan Bulan November Revisi telah dibayarkan BPJS Kesehatan sebesar Rp 2.925.000 pada tanggal 10 Januari 2022, Piutang BPJS Bulan Desember RJTP telah dibayarkan oleh BPJS sebesar Rp 32.790.000 pada tanggal 25 Januari 2022, sedangkan Piutang Jamkesda sebesar Rp 880.000 belum dibayarkan .
- Puskesmas Pekalongan Selatan telah mencatat piutang pelayanan tahun 2021 yang diverifikasi setelah tanggal pelaporan (Subsequent event)
- Piutang yang diterima tidak sebesar verifikasi karena adanya biaya transfer

5 PENYISIHAN PIUTANG

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 Rp.	Tahun 2020 Rp.
Penyisihan Piutang	182.975,00	353.325,00
Jumlah	(182.975,00)	(353.325,00)

Umur Piutang	Tarif Penyisihan	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan
0 s/d 1 Tahun	0,50%	36.595.000,00	182.975,00
> 1 Tahun s/d 2 Tahun	10%	-	-
> 2 Tahun s/d 3 Tahun	50%	-	-
> 3 Tahun	100%	-	-
Jumlah			182.975,00

6 PERSEDIAAN

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 Rp.	Tahun 2020 Rp.
Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	210.000,00	-
Persediaan Bahan Bakar & Pelumas	-	-
Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-
Persediaan Alat Tulis Kantor	-	-
Persediaan Kertas Dan Cover	-	-
Persediaan Bahan Cetak	-	-
Persediaan Benda Pos	-	-
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-
Persediaan Bahan Komputer	-	-
Persediaan Perabot Kantor	3.263.200,00	541.609,05
Persediaan Alat Listrik	-	-
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
Persediaan Obat	35.402.136,37	38.293.799,32
Persediaan Obat-obatan Lainnya	120.182.845,11	110.966.096,85
Persediaan Natura	-	-
Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	-	-
Jumlah Persediaan	159.058.181,48	149.801.505,22

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Penggunaan	Saldo Akhir
-Persediaan Bahan Konstruksi dan Bangunan	-	1.086.000,00	876.000,00	210.000,00
-Persediaan Bahan Bakar & Pelumas	-	2.057.387,00	2.057.387,00	-
-Persediaan Bahan Bibit dan Tanaman	-	21.500,00	21.500,00	-
-Persediaan Isi Tabung Gas	-	3.265.000,00	3.265.000,00	-
-Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	-	700.000,00	700.000,00	-
-Persediaan Alat Tulis Kantor	-	8.608.600,00	8.608.600,00	-
-Persediaan Kertas Dan Cover	-	11.960.500,00	11.960.500,00	-
-Persediaan Bahan Cetak	-	4.244.000,00	4.244.000,00	-
-Persediaan Benda Pos	-	250.000,00	250.000,00	-
-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	37.879.250,00	37.879.250,00	-
-Persediaan Bahan Komputer	-	1.698.000,00	1.698.000,00	-
-Persediaan Perabot Kantor	541.609,05	17.741.292,00	15.019.701,05	3.263.200,00
-Persediaan Alat Listrik	-	2.047.600,00	2.047.600,00	-
-Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	26.000,00	26.000,00	-
-Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	3.542.000,00	3.542.000,00	-
-Persediaan Obat	38.293.799,32	1.586.110.292,50	1.589.001.955,45	35.402.136,37
-Persediaan Obat-obatan Lainnya	110.966.096,85	337.556.174,90	328.339.426,64	120.182.845,11
-Persediaan Natura	-	16.858.000,00	16.858.000,00	-
-Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	-	141.749.500,00	141.749.500,00	-
Jumlah	149.801.505,22	2.177.401.096,40	2.168.144.420,14	159.058.181,48

Catatan:

- Penambahan Persediaan tabel mutasi berasal dari pengadaan Dana BLUD, APBD, dan Transfer masuk dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- Penambahan Obat sebesar Rp 3.173.633.879,71 terdiri atas pembelian obat BLUD sebesar Rp 40.000,00 dan sisanya Rp 1.586.070.293 merupakan Transfer Masuk dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- Penambahan Obat-obatan Lainnya sebesar Rp 337.556.174,90 terdiri atas Belanja BLUD sebesar Rp 12.012.400,00 Belanja APBD sebesar Rp 36.971.000,00 dan Transfer Masuk sebesar Rp 288.572.775
- Penggunaan Obat sebesar Rp 1.589.001.955,45 di dalamnya termasuk mutasi keluar karena Usang sebesar Rp 989.775,46 dan Rusak sebesar Rp 14.786.272,00
- Saldo Akhir Persediaan Obat BHP sebesar Rp. 33.897.798 dan obat vaksin sebesar Rp. 1.587.523.581,21 tidak dicatat karena sudah di catat di Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

Kode Persediaan	Nama Barang	Total Penerimaan	Nominal	Sisa Stock	Nominal
Persediaan Obat Lainnya - BHP					
01.01.07.01.04.02.03.155	ADS 0,5 ML	14.794	16.402.090,00	4.614	5.413.050,00
01.01.07.01.04.02.03.167	ALCOHOL SWAB	15.327	1.758.682,00	5.488	456.849,00
01.01.07.01.04.02.03.144	SAFETY BOX (SB) 5 LITER	146	2.376.158,00	69	927.398,00
01.01.07.01.04.02.03.337	ADS 0,3 ML	1.608	2.018.040,00	1.248	1.566.240,00
01.01.07.01.04.02.03.338	ADS 3 ML	268	152.492,00	18	10.242,00
01.01.07.01.04.02.03.226	NacL 0,9% 10 ML	268	4.836.240,00	-	-
01.01.07.01.04.02.03.321	APD SET 1	1	53.296,00	-	-
01.01.07.01.04.02.03.322	APD SET 2	64	6.300.800,00	-	-
Jumlah Persediaan Obat Lainnya - BHP		32.476	33.897.798,00	11.437	8.373.779,00
Persediaan Obat - Vaksin					
01.01.07.01.04.01.10	Vaksin Covid-19	3.977	1.587.523.586,21	84	59.143.571,20
Jumlah Persediaan Obat - Vaksin		3.977	1.587.523.586,21	84	59.143.571,20
Total		36.453	1.621.421.384,21	11.521	67.517.350,20

7 ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2021				
Rp.				
	Saldo Awal	Kenaikan	Penurunan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Tanah	-	1.193.000.000,00	-	1.193.000.000,00
Peralatan dan Mesin	516.171.916,00	3.410.213.906,78	1.300.000,00	3.925.085.822,78
Gedung dan Bangunan	-	5.077.982.010,74	-	5.077.982.010,74
Jalan, Irigasi & Jaringan	-	733.086.767,00	-	733.086.767,00
Aset Tetap Lainnya	-	957.500,00	-	957.500,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	516.171.916,00	10.415.240.184,52	1.300.000,00	10.930.112.100,52
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Mesin	439.270.640,00	2.994.757.612,78	-	3.434.028.252,78
Gedung dan Bangunan	662.812.065,00	101.373.470,00	-	764.185.535,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	136.404.453,00	24.411.225,00	-	160.815.678,00
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	1.238.487.158,00	3.120.542.307,78	-	4.359.029.465,78
Nilai Buku				6.571.082.634,74

Catatan :

- Penambahan Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp 10.415.240.185,52 terdiri dari:
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp 89.322.500,00
 - Transfer Masuk Dinkes berupa Tanah sebesar Rp 1.193.000.000,00 Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3.320.891.406,78 Gedung dan Bangunan sebesar Rp 5.077.982.010,74 Jalan Irigasi & Jaringan sebesar Rp 733.086.767,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 957.500,00
- Penurunan Aset Tetap sebesar Rp 1.300.000,00 merupakan Koreksi kurang Saldo Awal Peralatan & Mesin Rp 350.000,00 dan ekstrakomtabel sebesar Rp 950.000,00
- Penambahan Akumulasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.994.757.612,79 merupakan Beban Penyusutan tahun 2021.
- Penambahan Akumulasi Bangunan dan Gedung sebesar Rp 101.373.470,00 merupakan Beban Penyusutan tahun 2021.
- Penambahan Akumulasi Jalan, Irigasi & Jaringan sebesar Rp 24.411.225,00 merupakan Beban Penyusutan tahun 2021.

Tahun 2020				
Rp.				
	Saldo Awal	Kenaikan	Penurunan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	376.505.332,00	146.444.141,00	6.777.557,00	516.171.916,00
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	376.505.332,00	146.444.141,00	6.777.557,00	516.171.916
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Mesin	330.067.329,00	115.980.868,00	6.777.557,00	439.270.640,00
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	330.067.329,00	115.980.868,00	6.777.557,00	439.270.640,00
Nilai Buku				76.901.276,00

8 UTANG BELANJA

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 Rp.	Tahun 2020 Rp.
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.653.819,00	-
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	76.610.505,00	53.748.942,00
Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.463.906,00	5.024.699,00
Jumlah Utang Belanja Pegawai	106.728.230,00	58.773.641,00

Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	217.398,00	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	79.500,00	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.384.250,00	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	365.500,00	-
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	2.046.648,00	-
Jumlah Utang Belanja	108.774.878,00	58.773.641,00

Catatan:

- ¹ Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN merupakan utang jaminan kesehatan PNS yang dipotong dari Jasa Pelayanan untuk dibayarkan ke BPJS sebesar 4%.
- 2 Terdapat Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air sebesar Rp 500,00 karena dicatat terlalu besar.

9 LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Jumlah tersebut merupakan saldo Lain-lain PAD Yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 Rp.	Tahun 2020 Rp.
Pendapatan Jasa Layanan		
Layanan Umum	210.300.000,00	243.852.500,00
BPJS Kesehatan-Kapitasi	1.126.139.400,00	1.121.955.300,00
BPJS Kesehatan-Non Kapitasi	304.910.000,00	347.365.000,00
Jamkesda	13.755.000,00	10.235.000,00
Jampersal	5.300.000,00	11.070.000,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan	1.660.404.400,00	1.734.477.800,00
Pendapatan Hasil Kerjasama		
Pendapatan Hasil Kerjasama	3.000.000,00	3.250.000,00
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama	3.000.000,00	3.250.000,00
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Lain-lain BLUD yang Sah	81.635.000,00	284.664,00
Pendapatan Bunga Bank	240.195,00	1.213.679,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain	81.875.195,00	1.498.343,00
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah	1.711.562.920,00	1.739.226.143,00

Catatan:

- a. Pendapatan Hasil Kerjasama bersumber dari penyewaan lahan parkir selama tahun 2021 dengan pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama Nomor 440/012/I/2021 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Puskesmas Pekalongan Selatan.
- b. Pendapatan Lain-lain BLUD yang Sah sebesar Rp 81.635.000,00 merupakan pendapatan atas jasa administrasi kegiatan vaksinasi Covid - 19 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- c. Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 1.711.562.920,00 terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan sebesar Rp 1.660.404.400,00; Pendapatan Hasil Kerjasama sebesar Rp 3.000.000,00; dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp 81.875.195,00 yang dikurangi dengan Penerimaan Piutang Tahun 2020 di Tahun 2021 sebesar Rp 70.665.000,00 kemudian ditambah dengan Piutang Tahun 2021 dibayar 2022 sebesar Rp 36.595.000,00 dan Pendapatan atas Penghapusan Piutang sebesar Rp 353.325,00

10 PENDAPATAN APBN/APBD

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan APBN/APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 Rp.	Tahun 2020 Rp.
Pendapatan Barang Habis Pakai	153.754.000,00	-
Pendapatan Jasa Kantor	153.265.000,00	-
Pendapatan Perjalanan Dinas	255.700.000,00	-
Jumlah Pendapatan APBN/APBD	562.719.000,00	-

Catatan:

Rekening pendapatan APBN/APBD pada laporan keuangan daerah dicatat sebagai kewajiban untuk dikonsolidasikan

11 PENDAPATAN DARI ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 Rp.	Tahun 2020 Rp.
Pendapatan Dropping - Gudang Farmasi	1.874.643.067,40	-
Jumlah Pendapatan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	1.874.643.067,40	-

Catatan:

Pendapatan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan sebesar Rp 3.496.064.452,01 pada Laporan Keuangan Daerah dicatat sebagai Koreksi Ekuitas - Persediaan yang berasal dari Transfer Masuk Gudang Farmasi Dinas Kesehatan yang terdiri atas Persediaan Obat sebesar Rp 3.173.593.879,71 dan Persediaan Obat Lainnya sebesar Rp 322.470.573,30

12 PENDAPATAN HIBAH - LO

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Hibah - LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp.	Rp.
Hibah - Persediaan	-	9.638.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah - LO	-	9.638.000,00

13 BEBAN PEGAWAI

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp.	Rp.
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.653.819,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	249.799.453,00	437.846.772,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	101.191.764,00	99.104.303,00
Beban Gaji Pegawai Dana BLUD	643.140.000,00	866.265.000,00
Jumlah Beban Pegawai	1.006.785.036,00	1.403.216.075,00

14 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah tersebut merupakan Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp.	Rp.
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	876.000,00	7.024.650,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	-	6.045.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.057.387,00	1.904.000,00
Beban Bahan-Bahan Baku	-	567.000,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	21.500,00	205.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	750.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	3.265.000,00	5.975.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	25.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	700.000,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	-	195.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.608.600,00	14.159.868,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.960.500,00	8.935.999,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.244.000,00	4.863.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000,00	2.789.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	37.879.250,00	20.948.040,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.698.000,00	5.340.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.019.701,05	26.348.828,05
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.047.600,00	12.147.200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	26.000,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.542.000,00	25.467.800,00
Beban Obat-Obatan-Obat	1.589.001.955,45	339.102.254,33
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	328.339.426,64	275.047.526,08
Beban Natura dan Pakan-Natura	16.858.000,00	42.985.000,00
Beban Persediaan Penelitian-Penelitian Lainnya	-	600.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	-	-
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	141.749.500,00	-
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	-	-
Beban Pipa-pipa plastik PVC (UPVC)	-	3.544.000,00
Jumlah Beban Persediaan	2.168.144.420,14	804.969.665,46

15 BEBAN JASA

Jumlah tersebut merupakan Beban Jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 Rp.	Tahun 2020 Rp.
Beban Jasa Kantor		
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.750.000,00	6.500.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	2.250.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	421.528.777,00	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	-	69.111.692,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.670.000,00	4.350.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	-	-
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	450.000,00	-
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	10.000.000,00	-
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	81.200,00	90.600,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	4.950.000,00
Beban Jasa Penyelenggara Acara	900.000,00	-
Beban Jasa Pengolahan Sampah	2.020.000,00	-
Beban Tagihan Telepon	217.398,00	-
Beban Tagihan Air	2.544.500,00	-
Beban Tagihan Listrik	8.165.450,00	8.062.500,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.791.500,00	8.618.163,00
Beban Paket/Pengiriman	61.500,00	21.200,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	600.000,00	650.000,00
Beban Pengolahan Air Limbah	9.166.000,00	17.586.310,00
Jumlah Beban Jasa Kantor	474.196.325,00	119.940.465,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi		
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.358.393,00	64.733.198,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	31.369.058,00	-
Jumlah Beban Iuran Jaminan/Asuransi	61.727.451,00	64.733.198,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	-
Jumlah Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	-
Jumlah Beban Jasa	550.923.776,00	184.673.663,00

16 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah tersebut merupakan Beban Pemeliharaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 Rp.	Tahun 2020 Rp.
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	-	1.480.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	1.342.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	2.039.168,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	80.000,00	14.375.300,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	2.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.555.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	550.000,00	380.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	100.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	4.972.608,00	3.775.113,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	1.624.002,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	813.400,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	636.500,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	1.573.719,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	968.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	3.060.944,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	1.191.020,00	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.003.000,00	260.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	850.000,00	-
Jumlah Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.017.361,00	23.612.913,00

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.874.500,0	20.041.500,0
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	-	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	-	-
Jumlah Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.874.500,0	20.041.500,0

Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	275.000,00	-
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	275.000,00	6.650.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	550.000,00	6.650.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	67.441.861,00	50.304.413,00

17 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah tersebut merupakan Beban Perjalanan Dinas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 Rp.	Tahun 2020 Rp.
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	256.400.000,00	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	256.400.000,00	-

18 BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan Aset untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	366.419.697,97	52.130.431,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	101.373.470,00	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.411.225,00	-
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	492.204.392,97	52.130.431,00

19 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Penyisihan Piutang	182.975,00	353.325,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	182.975,00	353.325,00

***UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

LAMPIRAN

UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
JURNAL KOREKSI
 Per 31 Desember 2021
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
1	Koreksi Ekuitas - Dropping Obat Pendapatan Layanan yang Bersumber dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan <i>(Reklas jurnal dropping obat)</i>	3.496.064.452,01	3.496.064.452,01
2	a. Pendapatan Layanan yang Bersumber dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Beban Obat-Obatan-Obat Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya <i>(Koreksi atas pencatatan penerimaan transfer masuk persediaan obat (vaksin dari Kemenkes) dari Bagian Farmasi DINKES untuk dikeluarkan dari catatan)</i>	1.874.643.067,40	1.586.070.292,50 288.572.774,90
	b. Beban Obat-Obatan-Obat Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Persediaan Obat Persediaan Obat-obatan Lainnya <i>(Koreksi atas pencatatan saldo akhir persediaan obat (vaksin dari Kemenkes) di BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan untuk dikeluarkan dari catatan)</i>	59.143.571,20 8.373.779,00	59.143.571,20 8.373.779,00
	c. Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air Beban Tagihan Air <i>(Koreksi atas lebih catat utang belanja jasa kantor-tagihan Air)</i>	500,00	500,00
JUMLAH		5.438.224.869,61	5.438.224.869,61